

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN, KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BUNGO**

Harry Apriansyah¹

Sri Rahayu²

Misni Erwati³

¹ Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

^{2&3} Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

Email: h4rryapr1ansyah@gmail.com¹, srijambi@gmail.com², misniaja31@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the adoption of Government Accounting Standards, Human Resource Competencies and Utilization of Information Technology on the Quality of the Bungo District Government Financial Report. The data used in this study are primary data, with data collection methods carried out by distributing questionnaires. This research uses saturated samples. The sample used was 36 respondents. Data processing using SPSS 22 software. Before testing the hypothesis, the instrument quality test and classical assumption test were performed. The results of testing the instrument quality consisting of validity and reliability tests show that all question items are valid and reliable. The results of the classic assumption test which consists of normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test show that all data meet the requirements. Hypothesis testing results indicate that simultaneous Application of Government Accounting Standards, Human Resource Competencies and Utilization of Information Technology Influence the Quality of Financial Statements of the Bungo District Government. Partially the variables of the Implementation of Government Accounting Standards and the Use of Information Technology have no effect on the Quality of the Financial Statements of the Bungo Regency Government and the Human Resources Competency variable influences the Quality of the Financial Statements of the Bungo Regency Government.

Keywords: *Effect of Application of Government Accounting Standards, Human Resources Competence and Utilization of Information Technology on the Quality of Financial Statements of the Bungo District Government*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Sampel yang digunakan sebanyak 36 responden. Pengolahan data menggunakan software SPSS 22. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dilakukan uji kualitas instrumen dan uji asumsi klasik. Hasil pengujian kualitas instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan valid dan reliabel. Hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua data memenuhi persyaratan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo. Secara parsial variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penggunaan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo dan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Kata Kunci: Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo.

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Setyawan, 2018).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan menjadi media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggambarkan keluaran atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran keuangan selama satu periode tertentu. Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010, terdapat empat kelompok utama yang membutuhkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Empat kelompok utama tersebut, yaitu: masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; serta pemerintah. Untuk itu, pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk menyajikan dan melaporkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakainya.

Informasi akan dikatakan bermanfaat bila informasi tersebut dapat membantu dan mendukung pengambilan keputusan serta dapat dipahami oleh para pemakainya. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yakni relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Dengan terpenuhinya karakteristik tersebut laporan keuangan akan menjadi berkualitas.

Kualitas laporan keuangan pemerintah erat kaitannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku, oleh karena itu LKPD haruslah mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan. SAP berfungsi sebagai acuan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah disusun berdasarkan sistem yang memadai dan informasi yang termuat apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Udiyanti dan Ari, 2014).

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, akuntansi keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan

yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hevesi, 2005 dalam indriasari, 2008).

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan, jika tidak dilandasi dengan kompetensi yang memadai seseorang tidak akan mampu untuk mencapai kinerja tertinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi di dalam dirinya tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Hal ini berlaku di setiap bidang pekerjaan, begitu juga di entitas pemerintahan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten.

Menurut BPK kualitas laporan keuangan pemerintahan semakin membaik. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat. Berdasarkan data BPK, pada tahun 2009 sebanyak 44 dari 78 laporan keuangan kementerian dan lembaga atau sekitar 56 persen di antaranya memperoleh predikat WTP. Dan pada 2013 meningkat, yaitu menjadi 64 dari 86 atau sekitar 74 persen. Selain itu, walaupun peningkatan jumlah daerah yang mendapat WTP tidak sebaik di kementerian, trennya terus meningkat. Berdasarkan data 2009, pendapat WTP diberikan kepada 15 dari 504 daerah atau sekitar 3 persen. Tapi pada tahun 2013 membaik, yaitu diberikan kepada 153 dari 456 atau sekitar 33 persen dari keuangan pemerintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu entitas yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Menurut (Indonesia, 2007), Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang SAP, menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintah pada paragraf 35 menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan

laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas, 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antargenerasi (*international equity*) (SAP Nomor 24 Tahun 2005).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, mengatakan bahwa: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar ini maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan, jika tidak dilandasi dengan kompetensi yang memadai seseorang tidak akan mampu untuk mencapai kinerja tertinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara

efektif dan efisien. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan dengan baik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut (Ahyani, 2007:60) Penerapan SAP berbasis akrual memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntansi berbasis akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi berbasis kas karena dianggap laporan keuangan yang disajikan lebih percaya (Mardiasmo, 2009).

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Pengaruh Kompetensi Sumber Daya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut (Mardiasmo, 2002) Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa berkualitas dan baik.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Hamzah, 2009) dalam (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010) menyatakan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja

secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian dan model penelitian yang telah digambarkan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

H₂: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

H₃: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

H₄: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah asosiatif kausal (hubungan sebab akibat) dimana jika variabel dependen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y (Erlina & Mulyani, 2007). Unit analisis dalam penelitian ini yaitu OPD di Kabupaten Bungo yang berjumlah 18 OPD yang terdiri dari Dinas, Badan, dan sekretariat Daerah. Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *cross-sectional*, yaitu studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan (Sekaran & Uma, 2004).

Populasi Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dan Bagian Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Penetapan populasi ini ditentukan karena Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa PPK OPD mempunyai tugas melakukan Penataan Keuangan OPD dan menyiapkan laporan keuangan sebatas unit kerjanya masing-masing sedangkan Bagian Keuangan BPKAD adalah menyusun laporan keuangan konsolidasi yang dihimpun berdasarkan laporan keuangan masing-masing OPD yang akan dijadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh.

Menurut sugiyono (2012), sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh disebut juga sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

**Tabel 1. Populasi Dan Sampel Penelitian OPD
Pemerintahan Kabupaten Bungo**

NO.	Badan/Dinas/kantor	Populasi	Jumlah
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
4.	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
6.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
8.	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
9.	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
10.	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
13.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
14.	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang

15.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
16.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
17.	Dinas Peternakan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
18.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PPK • 1 Bendaharawan 	2 Orang
	Total	Populasi	36 Orang

Sumber: www.Bungokab.go.id

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Bungo, Sebagai penyempurna penelitian ini, peneliti mencari informasi melalui internet, media cetak, dan media lainnya yang menunjang penelitian ini.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk obyek atau orang yang sama, atau nilai dapat berbeda dal(am waktu yang sama untuk orang atau obyek yang berebeda (Erlina & Mulyani, 2007). (a). Variabel Dependen, variabel ini sering juga disebut dengan variabel terikat atau variabel tidak bebas. Variabel ini merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Melalui analisis terhadap variabel terikat memungkinkan untuk menemukan jawaban atau solusi masalah (Sekaran & Uma, 2004). Variabel ini dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi, variabel dependen adalah konsekuensi dari variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Skala yang digunakan adalah skala sikap Likert Interval. (b). Variabel Independen, variabel ini sering juga disebut dengan variabel bebas, variabel stimulus prediktor, atau *antecedent*. Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif (Sekaran & Uma, 2004). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner (Umar, 2001). Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang efektif karena dapat diperolehnya data standar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang karakteristik populasi yang diteliti (Supranto, 2000).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut (Lubis, 2012) data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti pada saat berlangsungnya penelitian. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner. Kuesioner diberikan kepada Kasubbag keuangan dan Bendaharawan dengan diantar langsung oleh peneliti dan kemudian diberikan waktu selama 1 (satu) minggu hari kerja bagi Responden. Pilihan jawaban kuesioner menggunakan skala sikap likert dengan skala ukur interval dengan lima jawaban yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan uji simultan (uji-F) dan uji parsial (uji-t) dengan menggunakan *software* SPSS (*Statistica Product and Service Solutions*).

Uji Kualitas Instrumendan Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2016). Pengujian validitas yang digunakan adalah Korelasi *Pearson*. Signifikansi Korelasi *Pearson* yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05. Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka butir pertanyaan tersebut valid dan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2016).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner menunjukkan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama. Pertanyaan yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas, maka akan ditentukan reliabilitasnya dengan melihat nilai dari *Cronbach's Alpha*. Apabila koefisien *cronbach's alpha* lebih dari 0,60, maka instrumen yang digunakan dikatakan reliabel (Ghozali, 2013).

Analisis Statistik Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Mengelompokkan atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data, juga merupakan salah satu bentuk analisis untuk menjadikan data mudah dikelola.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis statistik regresi linier berganda. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a = Konstanta

b₁;b₂;b₃ = Koefisien regresi berganda

X₁ = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X₂ = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X₃ = Pemanfaatan Teknologi Informasi

e = Standar eror

Uji Hipotesis Penelitian

Untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji statistik t, uji statistik F, dan uji koefisien determinasi.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Penelitian ini menggunakan koefisien dterminasi *adjusted R²*, karena penggunaan koefisien *adjusted (R²)* mempunyai kelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2013).

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengaetaahui secara simultan variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat dan untuk mengetahui model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak uji atau tidak. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel independen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2016). 1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, 2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji statistik F ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan signifikan F_{hitung} dengan ketentuan:

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ H_0 diterima atau H_1 ditolak

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ H_0 ditolak as

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan

atau tidak terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Kriteria yang digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan yaitu didasari oleh: 1) jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka H_a diterima, yang berarti menunjukkan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen, 2) Jika nilai signifikan lebih besar dari 5% maka H_a ditolak, yang berarti menunjukkan bahwa variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kevalidan suatu instrumen. Sebuah kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Data penelitian diuji kevaliditasnya dengan menggunakan korelasi bivariate dengan bantuan program aplikasi pengolah data. Hasil analisis korelasi bivariate dapat diketahui dengan melihat nilai pearson correlation. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian apabila nilai pearson correlation < maka butir pernyataan tidak valid, sedangkan apabila nilai pearson correlation > maka butir pernyataan dikatakan valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	0,529	0,3291	Valid
	0,664	0,3291	Valid
	-0,004	0,3291	Tidak valid
	0,714	0,3291	Valid
	0,356	0,3291	Valid
	0,565	0,3291	Valid
	-0,289	0,3291	Tidak valid
	0,621	0,3291	Valid
	0,765	0,3291	Valid
	0,463	0,3291	Valid
	0,406	0,3291	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,702	0,3291	Valid
	0,631	0,3291	Valid
	0,336	0,3291	Valid
	0,797	0,3291	Valid
Pemanfaatan Teknologi	0,373	0,3291	Valid
	0,741	0,3291	Valid
	0,675	0,3291	Valid
	0,356	0,3291	Valid

Informasi (X3)	0,804	0,3291	Valid
	0,752	0,3291	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	-0,124	0,329	Tidak valid
	0,741	0,3291	Valid
	0,525	0,3291	Valid
	0,482	0,3291	Valid
	0,599	0,3291	Valid
	0,621	0,3291	Valid
	0,620	0,3291	Valid
	0,628	0,3291	Valid

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2019

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan peneliti dengan melihat nilai Cronbach alpha dengan bantuan computer melalui program SPSS 22 . Uji reliabilitas dilakukan satu kali pengukuran saja, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 (ghozali, 2016).

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Status
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,732	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,742	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,747	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	0,730	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2019

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian yang diamati. Data yang diperoleh dari hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), rata-rata (mean), dan standar deviasi dari variabel yang diteliti, baik itu variabel independen maupun dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAP	36	27	41	35.69	3.285
SDM	36	13	25	19.86	3.006
TI	36	12	20	16.36	1.900
LKK	36	18	37	28.14	4.107
Valid (listwise)	36				

Sumber: Data yang di olah SPSS 22, 2019.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan menggunakan bantuan program SPSS 22. Berikut adalah tabel hasil pengujian analisis regresi linear berganda:

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a		
		Unstandardized Coefficients
Model		B Std. Error
1	(Constant)	14.451 6.225
	SAP	-.162 .230
	SDM	1.143 .323
	TI	-.198 .472

Sumber: Data yang di olah SPSS 22, 2019.

$$Y = 14,451 + -0,162X_1 + 1,143X_2 + -0,198X_3 + \epsilon$$

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model penelitian, dengan kriteria, jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan data nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan data nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut tabel hasil uji statistik F:

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F Sig.
1	Regression	275.020	3	91.673	9.304 .000 ^b
	Residual	315.285	32	9.853	
	Total	590.306	35		

Sumber: Data yang di olah SPSS 22, 2019.

Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel-variabel secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, apakah standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. benar-benar berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berikut disajikan tabel hasil Uji Signifikansi

Parameter Individual (Uji Statistik t) yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Model Statistik (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.451	6.225		2.322	.027
SAP	-.162	.230	-.130	-.703	.487
SDM	1.143	.323	.837	3.537	.001
TI	-.198	.472	-.091	-.418	.679

Sumber: Data yang di olah SPSS 22, 2019.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Berikut disajikan tabel hasil Uji Koefisien Determinasi R^2 yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.683 ^a	.466	.416	3.139

Sumber: Data yang di olah SPSS 22, 2019.

PEMBAHASAN

Standar akuntansi pemerintah, Sumber daya manusia dan Pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas laporan keuangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 9,304 dengan angka signifikansi $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini membuktikan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan sehingga H_1 dalam penelitian ini diterima.

Hasil dari persentase pengaruh variabel independen secara simultan terhadap manajemen laba menunjukkan hasil uji determinasi bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,416, nilai ini menunjukkan

bahwa variabel independen yaitu standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan sebesar 41,6% sedangkan sisanya sebesar 58,4% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Hasil koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bungo menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan yang berguna untuk mengvaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, juga menyediakan informasi untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian nilai t-hitung variabel Standar Akuntansi Pemerintah terhadap laporan keuangan sebesar -0,703 lebih kecil dari t-tabel 1,69092 dengan angka signifikansi $0,487 > 0,05$. Hasil ini menjelaskan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (**H₂ ditolak**). Hasil ini menjelaskan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan H₂ dalam penelitian ini ditolak. Dalam penelitian ini standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Nilai t-hitung variabel Sumber Daya Manusia terhadap laporan keuangan sebesar 3,537 lebih besar dari t-tabel 1,69092 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ ($\alpha=5\%$). Hasil ini menjelaskan bahwa variabel Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (**H₃ diterima**). Hasil ini menjelaskan bahwa variabel Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan H₃ dalam penelitian ini diterima.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Nilai t-hitung variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap laporan keuangan sebesar -0,418 lebih kecil dari t-tabel 1,69092 dengan nilai signifikansi $0,679 > 0,05$ ($\alpha=5\%$). Hasil ini menjelaskan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (**H₄ ditolak**). Dalam penelitian ini pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Standar Akuntansi Pemerintah, Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Dari hasil penelitian ini sebesar 41,6% dipengaruhi oleh variabel didalam penelitian ini dan sisanya sebesar 58,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel-variabel

independen tersebut mengalami kenaikan maka kualitas laporan keuangan juga akan naik, begitu juga sebaliknya, 2) Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo, 3) Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo, 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, hal ini disebabkan karena masih terdapatnya keterbatasan penelitian. Beberapa keterbatasan ini diharapkan dapat dikurangi bukan dihindari untuk penelitian selanjutnya, adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 1) Sampel penelitian ini merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dan Bagian Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo, 2) Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuisioner yang diberikan kepada pejabat penatausahaan keuangan organisasi perangkat daerah (PPK-OPD) dan bagian akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo.

Berdasarkan keterbatasan dan simpulan dari penelitian ini, maka peneliti menganjurkan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain: 1) Penelitian ini hanya pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, 2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Kartika, D., & Suhardjo, Y. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual)*. Jurnal STIE Semarang, Vol. 5, No. 3.
- Andi. 2003. *Promosi Efektif dengan Web*
- Andono, Alimbudiono, & Woelandari. 2004. *Studi Kasus Implementasi Sistem Penilaian Kinerja supplier Dalam Rangka penerapan Supply Management*. Jurnal. Universitas Surabaya.
- Azhar. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh*.
- Dyah Puri Surastiani dan Bestari Dwi Handayani. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Erlina, & Mulyani, S. 2007. *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Medan, USU Press.
- Fathoni, A. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*
- Hevesi, G. A. 2005. *For Internal Control in New York State Government*.
- Ihsanti, E. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*.
- Indonesia, I. A. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*
- Indriasari, Desi, Ertambang, & Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal. Simposium Nasional Akuntansi IX. Retrieved from
- Kesuma, Indra, Nadirsyah, & Darwanis. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1.
- Lubis, A. F. 2012. *Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis*. Medan.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*
- Nurillah, As Syifa. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan*
- Osti, E. 2015. *Pengaruh Kompetensi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Pratiwi, P. R., I Made Pradana Adiputra, dan Ananta Wikrama T. Atmadja. 2015. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Program S1, Vol. 3, No. 1.
- Ramadhan, & Sahrul. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, Pengendaliann Itern, Teknologi Infromasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satker Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Kepri*.
- Sekaran, & Uma. 2004. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*
- Setyawan Setia Andi. 2018. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Mediasi* (Studi Pada desa yang memiliki BUMDES Se Kabupaten Tegal).
- Soimah, S. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* C. Ketujuhbelas (Ed.)

Supranto, J. 2000. *Statistik (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Erlangga.

Syarifuddin, & Akhmad. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. Jurnal Fokus Bisnis, Vol. 14, No. 02.

Udiyanti, & Ari, N. L. N. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 2, No. 1.

Umar, H. 2001. *Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran*

Warisno. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*.

Wati, Desiana, K., Trisna, N., & Kadek, N. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Juurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 2, No. 1.

Wilkinson, & al, J. W. E. 2000. *Accounting Information System Essential Concept and Application*. New York-USA.: John Willey & Sons Inc.

Yosefrinaldi. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemafaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.